

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pendidikan merupakan hal penting yang dibutuhkan semua orang untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kecerdasan, mengasah akhlak serta menambah keterampilan diri.¹ Menurut Hafizah Ghany, pendidikan memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Dikatakan penting karena lewat pendidikan dapat ditanamkan pemahaman mengenai konsep pembangunan berkelanjutan.² Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi juga pada pembangunan karakter, nilai dan kemampuan individu untuk berkontribusi secara positif terhadap kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam membentuk generasi penerus yang berkompeten, berdaya saing dan bertanggung jawab.

Di Indonesia pendidikan dianggap sebagai hal yang mendesak. Urgensitas pendidikan di Indonesia dibuktikan dengan dua hal berikut. Pertama, secara konstitusional tema pendidikan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara turut serta mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, secara spesifik dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Negara tahu dan sadar bahwa pendidikan itu sendiri dapat meningkatkan dan mengembangkan peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.³ Dengan kata lain, lewat pendidikan negara mencoba membentuk masyarakat bangsa; baik secara perorangan maupun kelompok sebagai satu bangsa yang kreatif, inovatif serta berkarakter. Kedua,

¹ Maspa Makkawaru, "Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Konsepsi* 8, no. 3 (2019), hlm. 116.

² Hafizah Ghany, "Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah Dasar," *Madaniyah* 8, no. 2 (2018), hlm. 190.

³ Dodi Ilham, "Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 8, no. 3 (2019), hlm. 115.

secara politik pendidikan mendapat anggaran yang begitu besar. Dilansir dari CNBC Indonesia, pada tahun 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN 2024 untuk pendidikan nasional.⁴ Dari angka ini, dapat dilihat bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan di Indonesia.

Di atas kertas arah pendidikan nasional selama Reformasi semakin baik. Namun, terdapat beberapa catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia pernah berada dalam situasi kelam. Pada era Orde Baru secara khusus pasca-G30S PKI, Pemerintahan Soeharto melakukan pembaharuan dan pembangunan secara nasional di segala bidang termasuk pendidikan. Dalam rangka membangun negara di bidang pendidikan, ditemukan beberapa hal yang mengganjal seperti pengaplikasian Instruksi Presiden (Inpres) yang berlangsung dari segi kuantitas saja tanpa diimbangi dengan pertumbuhan mutu. Artinya, pendidikan hanya bertujuan untuk menghasilkan banyak lulusan kaum terdidik tanpa melihat mutu pengajaran serta hasil didikan.⁵

Pendidikan selama pemerintahan Orde Baru dipandang memiliki kepentingan politik dan terkesan sentralistik. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pengaruh ideologi terhadap seseorang guna mempertahankan pemerintahan Orde Baru yang sedang berlangsung.⁶ Menanggapi persoalan pendidikan pada masa Orde Baru ini, Y. B. Mangunwijaya memberikan komentar kritis terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, pola pendidikan yang dipakai Indonesia selama Orde Baru merupakan warisan mental dan praktik fasisme yang ditinggalkan oleh tentara Jepang.⁷ Sehingga dalam pemerintahan Soeharto nasionalisme berbau fasisme yang melahirkan cara pandang sempit di mana kepentingan negara ditempatkan di atas

⁴ Aristya Rahadian, "Anggaran Pendidikan 2024 Tembus Rp660,8 T, Buat Apa Saja?," *cncindonesia.com*, 2023, <https://www.cncindonesia.com/news/20231012100655-4-479927/anggaran-pendidikan-2024-tembus-rp6608-t-buat-apa-saja#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-Pemerintah%20mengalokasikan,saing%20menuju%20Indonesia%20Emas%202045>.

⁵ Hudaidah Safei and Hudaidah Hudaidah, "Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)," *Jurnal Humanitas* 7, no. 1 (2020), hlm. 3-4.

⁶ Dwi Risyanto and Dyah Kumalasari, "Pemikiran YB Mangunwijaya Tentang Pendidikan Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 1974-1999," *Risalah* 1, no. 1 (2016), hlm. 4.

⁷ Y.B. Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 63-64.

segala-galanya dan bersifat sentralistik.⁸ Hal ini kemudian justru membatasi kebebasan individu untuk berekspresi. Tidak heran jika praktik yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di mana pendidikan dibebankan oleh tugas politik pemerintahan saat itu membawa pengaruh tersendiri bagi perkembangan peserta didik.

Menurut Asmarani, selama era Orde Baru pemerintah mematkan kebebasan dan kreativitas anak dengan sistem pendidikan yang hanya menyuburkan “kepawangan” dan mental *taat buta* pada guru dan anak-anak.⁹ Kreativitas sebagai esensi dari “kemuridan” dibungkam. Murid hanyalah sebatas pendengar setia dalam ruang kelas – mereka menerima begitu saja apa yang disampaikan guru tanpa ada sikap dan pemikiran kritis. Murid ibarat sebuah wadah yang siap menampung semua bahan yang dikatakan guru. Sementara guru adalah *the banking of knowledge*, sumber segala pengetahuan. Secara tidak langsung murid diindoktrinasi karena dianggap tidak tahu apa-apa. Pendidikan semacam ini, menurut Mangunwijaya, tidak membebaskan karena guru dianggap superior dan murid hanya bawahan yang siap tunduk patuh.¹⁰

Akibatnya, masa kanak-kanak peserta didik dikurbankan hanya untuk memuaskan tujuan politik orang dewasa. Anak-anak dididik dengan sistem yang ketat; masuk TK mulai disuruh untuk berdisiplin dan harus tertib. Siswa-siswi SD, SMP dan SMA makin tunduk, patuh, makin jinak, makin tidak berani bertanya. Mereka dipaksakan untuk “disiplin” tanpa menyadari apa kegunaannya.¹¹ Menghadapi persoalan ini Mangunwijaya berpendapat, pendidikan mesti merangsang jiwa eksplorasi, kreasi dan inovasi kaum terdidik. Ia menegaskan visi pendidikan sebagai berikut:

Visi pendidikan tidak lain adalah “belajar sejati” itu sendiri. Inti dari “belajar sejati” adalah mengantar dan menolong anak didik untuk mengenal dan mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri,

⁸ Risyanto and Kumalasari, “Pemikiran YB Mangunwijaya Tentang Pendidikan Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 1974-1999”

⁹ Ni Nyoman Oktaria Asmarani, “Filsafat Pendidikan YB Mangunwijaya dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia,” 2018, hlm. 3.

¹⁰ Asmarani, *op. cit.*, hlm. 5.

¹¹ Y.B. Mangunwijaya, *Impian Dari Yogyakarta* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 40.

dewasa dan utuh. Manusia merdeka sekaligus peduli dan solider terhadap sesama manusia dalam upaya meraih kemanusiaan, dengan jati diri serta citra diri yang semakin utuh, harmonis dan integral.¹²

Dengan kata lain, Mangunwijaya menghendaki agar sistem pendidikan sentralistik diubah karena mempersulit lembaga pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Konsep merdeka belajar yang menekankan kreativitas-inovasi kaum terdidik menjadi aspek dasar yang ditekankan Mangunwijaya agar kaum terdidik menjadi dewasa dan utuh.

Munculnya kasus-kasus seputar kebijakan pendidikan pada era Orde Baru sebagaimana dikritik Mangunwijaya terus berlanjut hingga sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, kasus seputar dunia pendidikan berevolusi kian ruwet. Darmaningtyas dkk., menarasikan kasus seputar pendidikan akhir-akhir ini sebagai berikut:

Pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tiba-tiba mengalami gejala kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi pasca reformasi politik dimulai pada 21 Mei 1998. Tapi karena cara kerja dari tangan-tangan yang tidak kelihatan itu sangat halus, maka kecenderungan tersebut tidak mudah terbaca oleh masyarakat umum. Tahu-tahu masyarakat berada dalam satu perangkap yang membuat dirinya tidak dapat lagi mengakses pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi secara mudah.¹³

Fenomena yang diangkat Darmaningtyas dkk., mau menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan yang sejatinya memanusiakan manusia justru dipolitisasi demi tujuan tertentu oleh sekelompok orang penguasa. Hal ini secara langsung menegasikan esensi pendidikan.

Persoalan seputar dunia pendidikan ternyata sudah lama dibicarakan jauh sebelum Mangunwijaya. Seorang filsuf Amerika Latin, Paulo Freire juga ternyata sudah membaca gejala penderitaan manusia akibat ketimpangan, penindasan dari sistem sosial yang kurang menguntungkan rakyat kecil. Filsuf asal Brazil ini mengemukakan pemikiran filosofisnya tentang konsientisasi; pendidikan yang

¹² Aly Masyhar, "Konsep Pendidikan YB. Mangunwijaya. Pr.," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 20, no. 1 (2009), , hlm. 176.

¹³ Darmaningtyas, *Melawan Liberalisme Pendidikan* (Yogyakarta: Madani, 2014), hlm. 1.

menyadarkan.¹⁴ Konsep konsientisasi yang diusung Freire berawal dari situasi Brazil. Denis Collins menarasikan situasi Brazil, tempat Freire hidup dan berjuang:

Di awal tahun 1960-an, Brazil merupakan sebuah negara yang bergejolak. Banyak gerakan reformasi tumbuh pada saat yang bersamaan, karena golongan sosialis, golongan populis dan militan Kristen semua mengejar tujuan sosial politiknya masing-masing. Pada waktu itu, Brazil berpenduduk sekitar 34,5 juta jiwa, dan hanya 15,5 juta orang saja yang dapat memberikan suara. Buta aksara tidak diperkenankan karena hak pemberian suara seseorang tergantung pada kemampuan baca tulisnya.¹⁵

Dapat dibayangkan situasi penderitaan yang dialami rakyat masa itu. Menurut Asmarani, latar belakang mengapa Freire berkecimpung di dunia pendidikan adalah pengalaman atas situasi kehidupan sosial yang penuh dengan derita di zaman Malaise, sebagai akibat dari kemerosotan ekonomi negara berkembang dan industri pada 1929.¹⁶

Salah satu sasaran kritik Freire adalah pada pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Freire menemukan adanya dominasi politik dan budaya yang begitu besar. Dominasi yang sedemikian besar itu merambat hingga pada pilar pedagogik yang olehnya dinilai tradisional dogmatis.¹⁷ Dengan kata lain, dominasi politik dan budaya yang begitu kental dalam dunia pendidikan, menurut Freire akan berdampak pada sistem nilai yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai nilai dasar dalam berbudaya. Akibatnya adalah akan muncul budaya bisu di kalangan masyarakat miskin dan tertindas, karena situasi yang telah dikonstruksi penguasa, dengan menanamkan nilai-nilai tertentu yang justru menguntungkan pihaknya sendiri dianggap biasa oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang digodok kaum penindas hanyalah aktivitas *transfer of knowledge* (pemindahan pengetahuan) belaka, persis sebagaimana Mangunwijaya kritik pada Orde Baru. Freire sendiri menggambarkan pendidikan di Brazil pada zamannya sebagai berikut:

¹⁴ Paulo Freire, *Politik Pendidikan*, trans. Fuad Arif Fudiyartanto Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 155.

¹⁵ Denis Collins, *Paulo Freire; Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*, trans. Henry Heyneardhi dan Anastasia P (Yogyakarta: Komunitas APIRU, 2011), hlm. 9-10.

¹⁶ Ni Nyoman Oktaria Asmarani, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Brazil, anak didik tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi tetapi dilihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan dan pengetahuan. Karena itu semakin “wadah” diisi penuh, maka penilaian terhadap guru pun semakin baik. Murid atau peserta didik hanya menghafal seluruh yang diceritakan guru tanpa mengerti.¹⁸

Pendidikan model ini kemudian Freire namakan sebagai pendidikan “gaya bank”. Disebut demikian, karena guru tidak memberikan pengertian kepada anak didik. Pendidikan menjadi sebatas aktivitas guru memindahkan beberapa rumusan atau ilmu pengetahuan untuk disimpan oleh murid. Kemudian, murid akan mengeluarkan apa yang telah ditransfer guru dalam bentuk yang sama pada saat diperlukan, termasuk saat ujian. Freire menganggap bahwa model pendidikan seperti ini justru memiskinkan daya cipta seorang murid.

Pendidikan “gaya bank” menurut Freire adalah alat langgeng bagi penguasa untuk melestarikan penindasan terhadap sesama manusia. Penguasa menindas masyarakat kecil, sehingga kemiskinan dan kemelaratan mewabah hampir di seluruh daratan Brazil. Bagaimana praktik penindasan itu terjadi? Otoritas penguasa pada masa Freire membius kesadaran kritis masyarakat tentang penindasan yang sedang mereka lancarkan, sehingga masyarakat tidak tahu apa-apa bahwa dirinya sedang ditindas. Masyarakat hanya menyadari dan mengartikan fenomena penindasan sebagai nasib atau hal lumrah yang biasa terjadi. Meskipun masyarakat sadar akan penindasan yang sedang terjadi, penguasa melalui antek-anteknya langsung membungkam masyarakat agar tidak terjadi pemberontakan. Salah satu hal utama lain yang diangkat Freire misalnya hak untuk bersekolah. Pada masa Freire yang berhak sekolah adalah mereka yang terlahir dari keluarga konglomerat dan pejabat pemerintah, sementara mereka yang berasal dari keluarga kalangan bawah seperti orang miskin, pemulung dan kaum pinggiran lainnya tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah. Tidak heran, pada saat itu jumlah orang yang buta huruf meningkat pesat, karena sekolah hanya dimiliki oleh mereka yang dianggap mampu dan memiliki kuasa tertentu.¹⁹

¹⁸ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, trans. Yuhda Wahyu Pradana (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2019), hlm. 50.

¹⁹ Collins, *op. cit.*, hlm. 9.

Membaca fenomena ini, pendidikan sebagai alat memanusiakan manusia hemat Freire menjadi senjata utama untuk melawan ketidakadilan yang sedang terjadi. Pendidikan, sebagaimana diungkapkan Freire dalam bukunya *Pendidikan Kaum Tertindas* adalah suatu model pendekatan pedagogik yang berorientasi pada pembebasan manusia dari tekanan dan rasa takut akibat otoritas penguasa.²⁰ Iklim pendidikan yang memeralat dan menindas manusia disebut Freire sebagai dehumanisasi. Menurutnya, pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia (humanisasi) justru dipakai untuk mengindoktrinasi manusia itu sendiri. Pendidikan dipakai demi kepentingan kelompok penindas tertentu dengan dalil kesejahteraan umum (dalam bahasa Freire disebut kedermawanan sejati). Pendidikan kaum tertindas yang dijiwai oleh kedermawanan sejati artinya sebuah pendidikan yang lebih mengedepankan sifat egoistis kaum penindas yang dibungkus dengan baju kedermawanan palsu dari kaum paternalisme.²¹

Dalam konteks ini filsafat pendidikan Paulo Freire dimengerti sebagai bentuk keberpihakan kepada kaum tertindas. Bagi Freire, sebagai suatu pedagogi, pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, melainkan tentang bagaimana menyadarkan masyarakat dari ketidaktahuan dan dari situasi tertindas. Dengan demikian, Freire sebenarnya menjadikan pendidikan sebagai media untuk memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas oleh kekuasaan penindas. Sadar akan pentingnya kemanusiaan seseorang, maka Freire berkata demikian:

Kelompok yang tertindas perlu berjuang untuk melakukan perubahan terhadap penderitaan yang mereka alami, bukan menyerah begitu saja. Menyerah pada penderitaan adalah sebuah bentuk penghancuran diri, maka harus ada perubahan yang diyakini mampu menggerakkan semangat. Hanya dengan keyakinan ini yang terus menggelora sampai saatnya berjuang, mereka memiliki masa depan yang berarti, bukannya ketidakjelasan yang mengalienasi atau masa depan yang sudah ditakdirkan, namun menjadi tugas untuk membangun dan ini merupakan sebutir benih kebebasan.²²

Freire tidak menginginkan konsep “mesti terima kenyataan” bagi kaum tertindas. Ia justru mendorong kaum tertindas untuk bangkit dari kenyataan yang ada, yakni

²⁰ Freire, *op. cit.*, hlm. 27.

²¹ Muhammad Husni, “Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire ‘Pendidikan Kaum Tertindas’ Kebebasan Dalam Berpikir,” *Al-Ibrah* 5, no. 2 (2020), hlm. 42.

²² Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas, op. cit.*, hlm. 53.

situasi ditindas. Oleh karena itu, Freire juga melibatkan aspek penting yang mesti ditanam dalam diri masyarakat yakni kesadaran akan situasi derita. Kesadaran model ini sangat penting sebab dengan sadar akan realitas penindasan, manusia semakin didorong untuk berjuang keluar dari situasi penderitaan.

Freire sebenarnya mencoba memperjuangkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas oleh kaum penindas. Untuk itu perlu ada praksis yang merupakan suatu proses interaksi antara proses dan aksi. Namun, sebelum bergerak jauh menuju proses itu, Freire menekankan kesadaran dalam diri kaum tertindas sebagai gerbang untuk melawan penindasan. Kesadaran ini penting agar manusia merasakan secara kritis “cara mereka hadir” di dunia “yang dengannya” dan “di dalamnya” mereka bisa menemukan diri sendiri, mereka bisa melihat dunianya bukan sebagai realitas statis, namun realitas yang ada kaitannya dengan proses perubahan.²³

Secara sepintas, Aksi Freire ini memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan Yesus. Yesus sebagai seorang tokoh ikonik iman Kristiani yang dibahas khusus dalam Kitab Suci Perjanjian Baru menampilkan hal serupa. Ada beberapa praktik dan ajaran Paulo Freire yang merujuk pada konsep konsientisasi sebagaimana Yesus juga bahas dalam pengajarannya. Dalam penelitian ini penulis memilih perikop Matius 5-7 tentang khotbah Yesus di bukit sebagai pegangan dasar dalam mengembangkan argumentasi karena, menurut Penulis, khotbah di bukit bermotif pembebasan.

Jika dikaji secara mendalam sebenarnya khotbah Yesus di bukit dalam Matius 5-7 dilatarbelakangi oleh historisitas penderitaan umat Israel. Drane dalam bukunya *Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis-Teologis* menegaskan ketimpangan yang terjadi – bahwa pada zaman Yesus terdapat penggolongan status sosial yang sangat mencolok. Orang Yahudi (termasuk Yesus) yang tinggal di pedesaan Palestina dianggap sebagai bangsa yang tidak terdidik, fanatik, dan hidupnya timpang, sehingga sukar bagi mereka untuk diterima di Yerusalem, ibu

²³ Freire, *op. cit.*, hlm. 73.

kota agama setempat.²⁴ Di samping itu, orang Yahudi dan Romawi acap kali menganggap dirinya penting dan berpengaruh karena memiliki pengetahuan luas dibanding orang pedesaan di Palestina, sehingga mereka mencap orang Galilea sebagai orang yang terbelakang.²⁵

Atas dasar itu, Yesus bersamaan dengan ajaran-Nya mencoba membuka cakrawala berpikir orang Israel yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari sesama Yahudi. Secara gamblang, Yesus menjadikan ajaran (pendidikan) sebagai media untuk menyadarkan masyarakat yang sedang tertindas. Misalnya pada awal bab kisah khotbah di bukit, Yesus pertama-tama menyerukan kerinduan esensial manusia yakni kebahagiaan (Bdk. Mat 5:3-12). Dalam bahasa Yunani kata bahagia (*makarios*) yang artinya suka cita yang tidak terganggu oleh perubahan situasi hidup.²⁶ Sebagai guru sejati, Yesus menekankan prinsip kebahagiaan sebagaimana yang diulas dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Indonesia. Hal ini selaras dengan apa yang ditekankan Talan bahwa pada bagian awal khotbah di bukit, Yesus menekankan kebahagiaan dan kebenaran mutlak dalam Yesus.²⁷ Ucapan “berbahagia” ini bukanlah suatu seruan tanpa sebab. Ucapan “berbahagialah” ini muncul sebagai respon Yesus dalam menanggapi kesengsaraan, penderitaan dan ketakutan yang menyiksa pada waktu itu. Perihal situasi masyarakat Yahudi kala itu, Xavier Leon-Dufour sebagaimana dikutip dari Baskita Ginting mengatakan demikian:

Secara politik atau pemerintahan, orang Yahudi ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Dari segi ekonomi dan sosial, orang Yahudi harus bekerja untuk menunjang kehidupan. Sama seperti sekarang perkembangan dan pelaksanaan ibadah mereka dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang berlaku pada saat itu. Pertanian, perindustrian, keuangan, pendidikan dan pengangkutan serta perjalanan mempengaruhi kehidupan orang Yahudi.²⁸

²⁴ John Drane, *Memahami Perjanjian Baru*, trans. P.G. Katoppo (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 22.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Simon Runtung and Rini Bunga, “Kompetensi Pedagogik Yesus Berdasarkan Matius 5-7 dan Implementasinya dalam Pelayanan Sekolah Minggu,” *Jurnal Misioner* 1, no. 1 (2021), hlm. 104.

²⁷ Yesri Talan, *Pola Dasar Hidup Kristen: Kajian Teologis Terhadap Khotbah Yesus di Bukit* (Bengkulu: Permata Rafflesia, 2020), hlm. 54.

²⁸ Baskita Ginting, “Kebahagiaan Orang Percaya: Refleksi Teologis Matius 5: 1-12,” *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2018), hlm. 3.

Berdasarkan pendapat Leon-Dufour, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat Israel sedang dijajah oleh penguasa yang berkuasa saat itu. Keadilan sosial masyarakat pada zaman Yesus sangat memprihatinkan. Kebijakan yang dikeluarkan penguasa secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi masyarakat, yakni penderitaan. Rupanya Yesus sadar akan situasi itu. Oleh karena itu, Ia hendak menyadarkan masyarakat dari penderitaan yang mereka alami dengan ajaran-Nya sendiri. Harianto G.P sebagaimana dikutip dari Vicky Taniady menegaskan bahwa Yesus merupakan guru yang sempurna dan memiliki kompetensi pedagogik yang luar biasa.²⁹ Hal ini dibuktikan pada awal bab 5 dengan hadirnya orang banyak yang dengan setia mendengarkan ajaran Yesus, kemudian pada bagian akhir orang-orang merasa takjub akan pengajaran Yesus (Bdk. Mat 7:28).

Dengan penggunaan metode pembelajaran yang diangkat dari konteks masyarakat masa itu, sebenarnya Yesus secara perlahan menyadarkan masyarakat dari situasi yang dialaminya. Misalnya dalam hal berpuasa Yesus menyarankan semua orang untuk tidak mempraktikkan cara berpuasa yang lazim dilakukan oleh orang munafik (Bdk. Mat 6:16-18). Hal berpuasa menurut tradisi Yahudi adalah suatu kewajiban yang dilakukan bagi setiap pemeluknya. Perumpamaan hal berpuasa ini sebenarnya mau menggambarkan situasi ketimpangan dalam hal agama, di mana pemuka agama yang secara *de facto* sebagai penjaga dan pemelihara hukum taurat menodai arti puasa itu sendiri. Yesus datang dengan ajarannya untuk membongkar intrik pemuka agama kala itu yang menjadikan agama sebagai media untuk mencari popularitas. Pada saat itu cara hidup hedonis membuat masyarakat mengarah kepada pemuasan hawa nafsu yang kemudian mengakibatkan pelanggaran hukum. Semuanya itu dianggap biasa dalam masyarakat karena lazim dipraktikkan.³⁰ Menanggapi hal itu, maka Yesus memunculkan pengajaran perihal mengumpulkan harta di surga (Bdk. Mat 6:19-24).

²⁹ Vicky Taniady, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Kristen dalam Khotbah di Bukit Pada Matius 5-7," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 6, no. 1 (2022), hlm. 40-41.

³⁰ Merrill Chapin Tenney, *Survei Perjanjian Baru* (Malang: Gandum Mas, 1995), hlm. 72.

Yesus bukanlah seorang ahli khotbah yang pandai berceloteh seperti “*gaya bank*” di hadapan publik Yahudi. Dalam ajaran-Nya ia selalu melibatkan semua orang yang sedang mendengarkan pengajaran-Nya. Yesus tidak saja menjadikan praktik pengajaran-Nya sama seperti *the banking of knowledge* sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan guru pada pemerintahan Orde Baru. Dalam khotbah di bukit, interaksi antara Yesus dan para murid serta pendengar lainnya terlihat jelas. Hal ini merupakan metode yang umum dalam praktik pengajaran para Rabbi Yahudi zaman itu.

Yesus dan Freire memiliki tujuan akhir yang hampir sama. Yesus bersama ajaran-Nya mencoba menggugah hati masyarakat kecil di sekitar Galilea akan fenomena penindasan yang telah dianggap biasa. Freire, dalam kacamata filsafatnya mencoba menjadikan pendidikan sebagai senjata untuk melawan kaum penindas yang berkuasa pada zamannya. Kedua-duanya memiliki misi yang sama dalam bidang pendidikan, yakni menyadarkan masyarakat pada situasi tertindas. Dengan kesadaran yang diperoleh, mereka kemudian menjadikan pendidikan sebagai suatu modal untuk membangun citra masyarakat yang tertindas. Berdasarkan latar belakang ini, penulis menyusun skripsi dengan judul: **“KHOTBAH DI BUKIT MENURUT MATIUS 5-7 DARI PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE”**. Di dalam tulisan ini, pokok pemikiran filosofis-pedagogis Paulo Freire diangkat sebagai perspektif dalam membaca Matius 5-7. Dengan kata lain, kajian ini merupakan suatu hermeneutika terhadap Matius 5-7 dari perspektif filsafat pendidikan Paulo Freire, sehingga nilai-nilai didaktis dalam teks tersebut terungkap secara jelas.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dieksplorasi melalui skripsi ini adalah *bagaimana menafsir Khotbah di Bukit menurut Matius 5-7 dalam perspektif filsafat pendidikan Paulo Freire?* Permasalahan utama ini kemudian diuraikan secara lebih spesifik melalui tiga pertanyaan rumusan masalah turunan, yaitu (1) apa isi Khotbah di Bukit dalam Matius 5-7?, (2) bagaimana konsep filsafat pendidikan Paulo Freire?, dan (3) bagaimana membaca Khotbah di Bukit dari perspektif filsafat pendidikan Freire?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum, penulisan karya ini bertujuan untuk menguraikan secara hermeneutis Khotbah di Bukit dalam Matius 5-7 dalam perspektif filsafat pendidikan Paulo Freire. Uraian terhadap tujuan utama ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) menjelaskan isi Khotbah di Bukit dalam Matius 5-7; (2) menguraikan konsep filsafat pendidikan Paulo Freire, dan (3) menjelaskan Khotbah di Bukit dari perspektif filsafat pendidikan Paulo Freire.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini, penulis melakukan studi dokumen untuk mempelajari sejarah pendidikan di Indonesia dan menilainya dari perspektif Paulo Freire. Penulis terlebih dahulu mendalami perspektif filsafat pendidikan menurut Paulo Freire dan kemudian mengembangkannya sebagai indikator atau kaca mata dalam menggali unsur-unsur atau nilai dalam Khotbah di Bukit menurut Matius 5-7.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini akan dibahas dalam empat bagian besar. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas; Latar Belakang Penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan. Bab II menyajikan pembahasan atas konsep teori filsafat pendidikan Paulo Freire. Pada bab III akan dibahas khusus tentang khotbah Yesus di bukit menurut Matius 5-7. Bab IV merupakan ulasan penulis dalam membaca model pendidikan Yesus dalam Khotbah di Bukit menurut Matius dari perspektif filsafat pendidikan Paulo Freire. Bab V merupakan kesimpulan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran (rekomendasi intelektual) serta bibliografi.